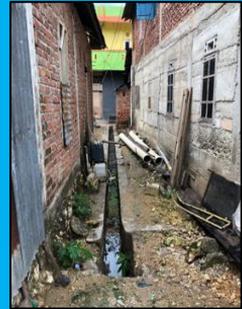


**MODEL INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
PADA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU**

**Sustainable Infrastructure Model
In Handling Slum Settlements In Wolio Subdistrict
Baubau City**



LA ODE RIZKI SATRIA ADI PUTRA

P082201003

PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN PRASARANA

SEKOLAH PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**MODEL INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
PADA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN WOLIO
KOTA BAUBAU**

**LA ODE RIZKI Satria Adi Putra
P082201003**



**PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN PRASARANA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**MODEL INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
PADA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN WOLIO
KOTA BAUBAU**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Teknik Perencanaan Prasarana

Disusun dan diajukan oleh

LA ODE RIZKI SATRIA ADI PUTRA
P082201003

kepada

**PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN PRASARANA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

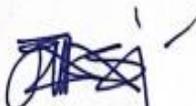
TESIS**MODEL INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
PADA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU****LA ODE RIZKI SATRIA ADI PUTRA
P082201003**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 29 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Teknik Perencanaan Prasarana
Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Makassar
Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Dr. Edward Syarif, ST., MT
NIP.196906121998021001

Pembimbing Pendamping,



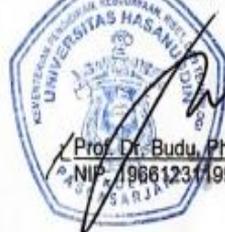
Dr. Ir. Idawarni J. Asmal, MT
NIP.196507011994032001

Ketua Program Studi
Teknik Perencanaan Prasarana,



Dr. Ir. Idawarni J. Asmal, MT
NIP. 196507011994032001

Dekan Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.MedEd
NIP. 196612311995031009

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Model Infrastruktur Berkelanjutan Pada Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Dr. Edward Syarif, ST., MT sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Idawarni J. Asmal., MT sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (Tuijun Jishu/ Journal Of Propulsion Technology Volume 45 Issue 2 Tahun 2024 Halaman 3262) sebagai artikel dengan judul "Sustainable Infrastructure Model in Handling Slum Settlements in Wolio Subdistrict Baubau City". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 29 Mei 2024

LA ODE RIZKI SATRIA ADI PUTRA
P082201003

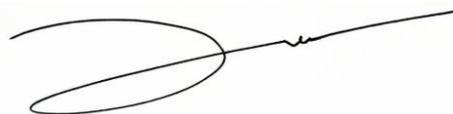
Ucapan Terima Kasih

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Dr. Edward Syarif., ST., MT sebagai pembimbing utama dan Dr. Ir. Idawarni J. Asmal., MT sebagai pembimbing pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Bapak Camat Wolio dan Lurah Bataraguru yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan penelitian di lapangan, dan kepada Bapak Dr. Ir. Tamrin Tamim, S.Pd.,ST.,MT yang selalu berkesempatan untuk berdiskusi dengan saya sampai dengan penyusunan tesis ini selesai .

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ketua Prodi Teknik Perencanaan Prasarana Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh program magister serta para dosen dan rekan-rekan Teknik Perencanaan Prasarana terkhusus Angkatan 2020 yang senantiasa memberikan motivasi.

Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta, adik-adik beserta seluruh keluarga saya mengucapkan limpah terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan dan motivasi mereka selama saya menempuh pendidikan. Penghargaan yang besar juga saya sampaikan kepada Himpunan Mahasiswa Islam, senior-senior gode-gode ilmiah, kampung buton, renov, project dan uncle bus atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Penulis,



LA ODE RIZKI SATRIA ADI PUTRA

ABSTRAK

LA ODE RIZKI SATRIA ADI PUTRA. **Model infrastruktur berkelanjutan pada penanganan permukiman kumuh di kecamatan Wolio kota Baubau** (dibimbing oleh Edward Syarif dan Idawarni J. Asmal).

Semakin meningkatnya permukiman kumuh di kecamatan Wolio kota Baubau dalam 10 tahun terakhir, namun model skema penanganan infrastrukturnya belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Wolio Kota Baubau serta mengetahui dan menemukan model perbaikan infrastruktur melalui pendekatan berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan penilaian indikator kumuh dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 dan analisis SWOT. Data-data penelitian selanjutnya diolah menggunakan Microsoft Excel 2020. Kekumuhan tertinggi berada di kelurahan Bataraguru kecamatan Wolio kota Baubau dengan luas 10.34 Ha yang mencakup 11 RT dalam 5 RW. Nilai tingkat kekumuhan seluruhnya sebesar 18 (delapan belas) atau dengan rata-rata nilai sektoral kekumuhan sebesar 17.63% dan tergolong kumuh ringan dengan pertimbangan lain berpotensi menjadi kumuh tinggi yang disebabkan oleh faktor geografis dan demografis serta faktor sosial ekonomi sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan cara pemugaran dan peremajaan. Hasil analisis SWOT menunjukkan nilai kekuatan yang dimiliki sebesar 2.94 sedangkan kelemahan memiliki skor sebesar 1.88. Selain itu, peluang memiliki skor sebesar 4.00 dan ancaman memiliki skor sebesar 1.22. Model skema infrastruktur berkelanjutan menitikberatkan kemanfaatan infrastruktur pada peningkatan ekonomi sosial masyarakat. Penanganan permukiman kumuh di kecamatan Wolio Kota Baubau dapat dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar menggunakan pendekatan berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konsep penanganan permukiman kumuh dengan menggunakan model skema infrastruktur berkelanjutan.

Kata Kunci : permukiman kumuh, infrastruktur berkelanjutan, SWOT, kota Baubau

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua Sekretaris,
Tanggal : _____	

ABSTRACT

LAODE RIZKI SATRIA ADI PUTRA. **Sustainable infrastructure model in handling slum settlements in Wolio subdistrict, Baubau city** (Supervised by Edward Syarif and Idawarni J. Asmal).

Slum settlements have increased in the Wolio subdistrict, Baubau city in last 10 years, but the model for infrastructure management scheme is not yet known. This research aims to know the condition of slum settlements in Wolio subdistrict, Baubau City, find out the factors that cause the formation of slum settlements in Wolio subdistrict, Baubau City and find out and find models for improving infrastructure through a sustainable approach in handling slum settlements in Wolio subdistrict, Baubau City. This research use a descriptive analysis method based on the assessment of slum indicators in PUPR Ministerial Regulation Number 14/PRT/M/2018 and SWOT analysis. The research data was processed using Microsoft Excel 2020. The highest slums are in Bataraguru district, Wolio subdistrict, Baubau city with an area of 10.34 hectares covering 11 RTs in 5 RWs. The total slums level value is 18 (eighteen) or with an average sectoral slums value of 17.63% and is classified as light slums with other considerations having the potential to become a high slums caused by geographical and demographic factors as well as socio-economic factors so that handling can be done by means of restoration and rejuvenation. The results of the SWOT analysis show that the strength value is 2.94, while the weakness score is 1.88. In addition, opportunities have a score of 4.00 and threats have a score of 1.22. The sustainable infrastructure scheme model focuses on the benefits of infrastructure in improving the social economy of the community. Handling slum settlements in Wolio subdistrict, Baubau City can be done through repairing and upgrading basic infrastructure using a sustainable approach by utilizing available land. The results of this research can be used as a concept for handling slum settlements using a sustainable infrastructure scheme model.

Keywords : slum settlements, sustainable infrastructure, SWOT, Baubau city



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Batasan Penelitian.....	5
1.6. Landasan Teori.....	5
1.7. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
1.8. Kerangka Konseptual dan Skema Teoritis	14
1.9. Sistematika Penulisan	17
BAB II. METODE PENELITIAN	18
2.1. Rancangan Penelitian	18

2.2. Waktu dan Lokasi	18
2.3. Prosedur Penelitian	18
2.4. Sumber Data Penelitian.....	20
2.5. Teknik Pengumpulan Data	21
2.6. Populasi dan Sampel.....	22
2.7. Teknik Analisis Data	23
2.8. Definisi Operasional	25
BAB III. HASIL	27
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
3.2. Kondisi Eksisting Prasarana.....	34
3.3. Penilaian Tingkat Kekumuhan Prasarana	43
3.4. Hasil Analisis SWOT	52
BAB IV. PEMBAHASAN.....	58
4.1. Kondisi Permukiman Kumuh Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio	58
4.2. Faktor yang Mempengaruhi Kumuh	77
4.3. Penerapan Model Infrastruktur Berkelanjutan pada Skema Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau .	43
4.4. Hasil Analisis SWOT	52
BAB V. KESIMPULAN	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Kriteria, indikator dan penjelasan teknis kekumuhan.....	7
2. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	8
3. Pemberian skor sub kriteria dan parameter penilaian	9
4. Ringkasan penelitian terdahulu.....	13
5. Metode kriteria dan matriks kebutuhan data	16
6. Luas wilayah dan data kependudukan	28
7. Data kepadatan penduduk	29
8. Tipologi Permukiman Kumuh Baubau.....	30
9. Daftar RW/ RT kawasan kumuh Bataraguru.....	32
10. Luas verifikasi kawasan kumuh.....	32
11. Data kepadatan penduduk	33
12. Data luas dan sisa tanah kosong dilokasi penelitian	34
13. Data keteraturan bangunan.....	34
14. Data jumlah bangunan dan tingkat kepadatannya	35
15. Jumlah bangunan hunian sesuai standar SNI Nomor 03-1733-2004.....	36
16. Jumlah penghuni rumah	36
17. Status lahan dan persentase kepemilikan IMB bangunan hunian (rumah)	37
18. Presentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	38
19. Pekerjaan kepala rumah tangga	39
20. Data ketersediaan dan kebutuhan drainase	40
21. Presentase KK terlayani sarana air minum.....	41
22. Volume buangan air limbah	42

23. Standar spek peralatan pengelolaan persampahan (SNI 3242:2008)	42
24. Hasil penilaian kumuh RT 01 RW 04	44
25. Hasil penilaian kumuh RT 01 RW 05	44
26. Hasil penilaian kumuh RT 01 RW 07	45
27. Hasil penilaian kumuh RT 01 RW 08	46
28. Hasil penilaian kumuh RT 02 RW 06	47
29. Hasil penilaian kumuh RT 02 RW 07	48
30. Hasil penilaian kumuh RT 02 RW 08	48
31. Hasil penilaian kumuh RT 03 RW 05	49
32. Hasil penilaian kumuh RT 03 RW 06	50
33. Hasil penilaian kumuh RT 03 RW 08	51
34. Hasil penilaian kumuh RT 04 RW 06	52
35. Tabel kekuatan	54
36. Tabel kelemahan	54
37. Tabel peluang.....	55
38. Tabel ancaman	56
39. Matriks IFAS.....	56
40. Matriks EFAS.....	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Bagan skema dan tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	9
2. Bagan pembangunan berkelanjutan	11
3. Bagan kerangka konseptual	15
4. Peta lokasi penelitian	19
5. Bagan alur penelitian	20
6. Bagan kerangka analisis penelitian	26
7. Peta administrasi kota Baubau	28
8. Peta kawasan permukiman kumuh kelurahan Bataraguru	29
9. Peta zonasi kawasan penelitian kelurahan Bataraguru	31
10. Analisis SWOT	53
11. Model dan kerapatan bangunan	59
12. Kondisi prasarana jalan eksisting	63
13. Kondisi ketersediaan air minum	67
14. Kondisi drainase eksisting	69
15. Kondisi sanitasi (MCK) mayoritas dilokasi penelitian	71
16. Diagram pengolahan SRAB (SNI 8455:2017)	72
17. Kondisi penampungan sampah	73
18. Grafik variabel faktor kumuh	75
19. Diagram proyeksi penduduk	78
20. Diagram persentase pekerjaan kepala rumah tangga	82

21. Diagram persentase tingkat pendidikan	84
22. Desain drainase yang sekaligus dapat difungsikan sebagai jalan lingkungan ...	88
23. Desain rencana pembangunan TPS	89
24. Rencana lokasi pembangunan TPS beton	90
25. Rencana lokasi pembangunan hydrant	91
26. Rencana penataan dikawasan bantaran sungai	92

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks SWOT Penanganan Permukiman Kumuh
2. Dokumentasi Penelitian
3. Kuesioner Penelitian dan Pedoman Wawancara Penelitian
4. Lembar Penilaian Infrastruktur
5. Numerik dan Persentase Kondisi Fisik Infrastruktur eksisting

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tercatat bahwa pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara terpadat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk mencapai 267.026.366 jiwa, luas wilayah mencapai 1.904.569 Km² dengan rasio perbandingan 3,47% dari jumlah penduduk dunia sehingga tingkat kepadatan mencapai 140 jiwa per km² (CIA World Factbook, 2020). Dalam data Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki 514 kabupaten/ kota dengan rincian 416 kabupaten dan 98 diantaranya berstatus sebagai kota. Jika dipersentasekan, tingkat kepadatan penduduk di Indonesia cenderung kecil pada wilayah kabupaten dan cenderung lebih besar pada wilayah perkotaan.

Kota secara umum didefinisikan sebagai tempat kedudukan pemerintahan dan tempat dihimpunya unsur administratif, eksekutif, legislatif maupun yudikatif (KBBI). Sehingga kota menjadi sebuah cerminan kemajuan dan berkembangnya suatu negara maupun wilayah daerah otonomi karena menjadi pusat administrasi. Selain itu, kota menjadi cerminan tumbuh kembangnya perekonomian dalam suatu daerah sebab kota pada umumnya menjadi pusat pelayanan perdagangan dan jasa. Hal inilah yang membuat kota menjadi tempat yang padat untuk ditinggali. Kota juga merupakan suatu sistim jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk cukup tinggi serta diwarnai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialis (Bintarto, 1983). Sebagai pusat perdagangan dan jasa, kota menjadi tempat yang sangat menjanjikan bagi sebagian orang yang hendak merubah kondisi ekonomi sehingga memicu terjadinya urbanisasi. Tidak hanya berdampak pada persoalan ekonomi, urbanisasi juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penduduk diperkotaan sehingga sangat mempengaruhi tingkat kepadatan wilayah suatu kawasan maupun permukiman pada daerah perkotaan akibat dari dampak urbanisasi tersebut.

Salah satu dampak dari urbanisasi yang sangat nyata dan kerap kita jumpai adalah tidak meratanya persebaran pembangunan baik pertokoan maupun permukiman penduduk sehingga membentuk kawasan-kawasan baru secara tidak terkendali. Suburbanisasi yang terjadi cenderung menghasilkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tidak teratur dan tersebar secara sporadis (Rustiadi dalam Hidajat, 2014). Pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan yang sangat pesat terutama oleh faktor urbanisasi dapat berdampak pada lingkungan, sosial dan ekonomi terhadap pembangunan berkelanjutan (Esch, *et al.*, 2014). Hal inilah yang dapat memicu terbentuknya klaster permukiman kumuh baru dikawasan perkotaan sehingga bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan tujuh belas agenda dunia yang disahkan sejak tahun 2015 melalui sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengertian yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang yang konsepnya terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. (Tanguay *et al.*, 2009; Yang, Xu, & Shi, 2016). Keseimbangan dalam tiga aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan demi mewujudkan tujuan

pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, ada dua hal yang harus digaris bawahi yaitu pembangunan dan berkelanjutan. Pembangunan yang memiliki tujuan selalu mengembangkan potensi menuju kondisi yang lebih baik, serta berkelanjutan yang mewakili makna ketahanan dan kelestarian (Cristian *et al.*, 2015). Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan dititik beratkan pada pemanfaatan sumberdaya yang saat ini kita miliki dengan tetap mempertimbangkan ketersediaannya untuk generasi dimasa yang akan datang.

Di Indonesia, komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan diterjemahkan melalui beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang meleburkan beberapa Undang-Undang sebelumnya misalkan tentang lingkungan dan penataan kota didalamnya sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Salah satu konsentrasi pemerintah pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar dengan menjadikan lingkungan dan permukiman kumuh sebagai isu strategis. Saat ini terdapat sekitar 40,39 persen rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. Untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan dibutuhkan upaya pemugaran, permajaan, dan permukiman kembali (PP Nomor 18 Tahun 2020). Bentuk penangan tersebut diimplemtasikan melalui berbagai program pemerintah dengan melakukan perbaikan infrastruktur pada area permukiman kumuh.

Infrastruktur secara umum diartikan sebagai prasarana dasar baik berbentuk fisik maupun nonfisik yang dapat menunjang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Robert J. Kodoatie (2005) mendefinisikan infrastruktur sebagai suatu sistim yang menunjang sistim ekonomi dan sosial yang sekaligus menjadi penghubung sistim lingkungan serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Pengertian ini dapat dijadikan rujukan dalam penanganan persoalan permukiman kumuh dari aspek perbaikan infrastruktur sebab selain infrastruktur, persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan juga menjadi hal penting diselesaikan guna mewujudkan cita-cita dunia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) khususnya pada aspek infrastruktur berkelanjutan (*sustainable infrastructure*). Infrastruktur berkelanjutan merupakan konsep pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan infrastruktur pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Iwan PK *et al.*, 2008). Infrastruktur berkelanjutan mengintegrasikan 3 (tiga) aspek pembangunan berkelanjutan didalamnya yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Infrastruktur merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan dan menilai tingkat kekumuhan suatu wilayah permukiman. Olehnya itu, perbaikan atau peningkatan infrastruktur dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi ataupun mengurai persoalan permukiman kumuh guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian penting dalam skema pembanguna infrastruktur berkelanjutan adalah lingkungan sebab lingkungan erat kaitannya dengan kesehatan sehingga akan berdampak pada sirkulasi sosial dan ekonomi masyarakat wilayah permukiman kumuh.

Kota Baubau merupakan salah satu kotamadyah dijazirah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat perdagangan dan jasa yang kedepannya dicanangkan sebagai ibukota persiapan Provinsi kepulauan Buton. Kota Baubau secara administratif memiliki 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Betoambari,

Kecamatan Wolio, Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Murhum, Kecamatan Batupoaro, Kecamatan Bungu, Kecamatan Kokalukuna dan Kecamatan Lea-Lea. Baubau menjadi penyangga perekonomian dari beberapa kabupaten sekitarnya diantaranya yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah. Hal ini pula yang menjadikan Baubau sebagai sasaran urbanisasi sehingga sangat berdampak pada tingkat kepadatan penduduk selain karena tingginya angka kelahiran. Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi pula menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan illegal sehingga membentuk kluster baru permukiman kumuh. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Kota Baubau pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 16,2 persen dengan rata-rata 1,62 persen pada tiap tahunnya (Kota Baubau dalam Angka, 2021).

Tingkat pertumbuhan penduduk selalu meningkat dari tahun ketahun sehingga berdampak pula pada tingkat kepadatannya yang juga meningkat secara bervariasi. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk di Kota Baubau mencapai 540 jiwa per Km², kemudian pada tahun 2017 sebesar 552 jiwa per Km², pada tahun 2018 sebesar 568 jiwa per Km². Konsentrasi pertumbuhan dan kepadatan penduduk pada tiap tahunnya terfokus di daerah pusat perkotaan khususnya di Kecamatan Wolio. Namun pada tahun 2019 terjadi perubahan kepadatan yang disebabkan oleh terbentuknya beberapa daerah baru dipinggiran kota khususnya pada kecamatan Batupoaro dan Sorawolio sehingga menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Baubau pada tahun 2019 mencapai 535, 30 jiwa per Km², dan terakhir pada tahun 2020 sebesar 540 jiwa per Km².

Kecamatan Wolio merupakan salah satu kecamatan di Kota Baubau dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi karena didalamnya terdapat kawasan pusat perbelanjaan dan permukiman penduduk serta ditetapkan sebagai salah satu kecamatan kumuh tertinggi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 673/X/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Baubau. Kecamatan Wolio memiliki permasalahan yang terdapat dalam program penataan permukiman kumuh selama ini adalah bahwa ruang gerak pelaksanaannya dibatasi oleh kondisi fisik tata bangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Sadyahutomo, 2006). Sebagai kecamatan tertua yang menjadi ibu kota pemerintahan Baubau, Wolio menjadi sasaran utama urbanisasi sehingga berdampak pada penataan ruang kota yang tidak terkendali.

Kecamatan Wolio terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan diantaranya, Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, Bukit Wolio Indah dan Kadolokatapi yang secara geografis sebagian berada dibantaran sungai serta sebagiannya berada dipinggir laut dan pegunungan. Sebagai pusat kota, kekumuhan di kecamatan Wolio menjadi masalah yang sangat penting untuk diatasi. Selain berdampak pada estetika wajah perkotaan, kawasan kumuh juga dapat menjadi kluster baru kerusakan lingkungan jika dibiarkan dalam kurun waktu yang lama serta akan memberikan dampak pada daerah disekitarnya. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang peneliti memilih kecamatan Wolio sebagai lokasi penelitian guna dilakukan pengkajian lebih dalam terhadap permasalahan yang ada.

Menurut *CSU's Urban Studies Department*, kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan buruk, kotor, penduduk yang padat serta

keterbatasan ruang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai macam ancaman seperti kebakaran dan kriminalitas. Terdapat berbagai cara yang bisa menjadi solusi dalam penanganan permukiman kumuh misalkan model penataan lahan kembali (*land readjustment*), model konsolidasi lahan (*land consolidation*), model *land sharing*, model permukiman Kembali (*resettlement*), serta model pembangunan rumah susun dan model perbaikan kampung (Ditjen Cipta Karya, 2006). Namun seiring dengan terus berkembangnya perkotaan, maka sangat penting pula untuk kita melakukan *prevention* terhadap potensi munculnya kawasan kumuh baru demi menjaga keberlangsungan lingkungan untuk generasi mendatang.

Perbaikan status sosial ekonomi dan kualitas lingkungan menjadi aspek penting dalam skema pembangunan infrastruktur berkelanjutan sebagai upaya perwujudan cita-cita dunia sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan hasil sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015. Kecamatan Wolio sebagai pusat pemerintahan menjadi ukuran kemajuan dan perkembangan bagi Kota Baubau dan daerah disekitarnya. Adanya kawasan permukiman kumuh harus menjadi perhatian penting berbagai pihak untuk dituntaskan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perbaikan infrastruktur merupakan salah satu solusi penanganan permukiman kumuh diperkotaan khususnya pada aspek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ekonomi, sosial maupun lingkungan. Meskipun sebelumnya beberapa penelitian telah dilakukan, tetapi penelitian ini mencoba untuk melihat persoalan penanganan kawasan permukiman kumuh di kecamatan Wolio Kota Baubau dalam hal perbaikan dan penataan infratraktur berkelanjutan sesuai dengan prinsip *sustainable development goals (SDGs)*. Berangkat dari ulasan diatas, maka judul penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah **“Model Infrastruktur Berkelanjutan Pada Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Wolio Kota Baubau”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas serta agar memfokuskan proses dan arah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau ?
- b. Faktor apasajakah yang menyebabkan terjadinya kekumuhan di Kecamatan Wolio Kota Baubau ?
- c. Bagaimana penerapan model infrastruktur berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

:

1. Untuk mengetahui kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Wolio Kota Baubau.
3. Untuk mengetahui penerapan model perbaikan infrastruktur melalui pendekatan berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktik. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1.4.1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pada ilmu Teknik Perencanaan Prasarana khususnya pada berbagai kasus perencanaan penataan dan penanganan permukiman kumuh di perkotaan.

1.4.2. Aspek Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan pada penelitian selanjutnya serta menjadi salah satu rekomendasi bagi pemerintah Kota Baubau untuk melakukan perencanaan penanganan pada kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen dan *pilot project* pemerintah pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam rangka meminimalisir terbentuknya kawasan permukiman kumuh baru ditengah maupun pinggiran perkotaan.

1.5. Batasan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian ini, maka sangat diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kondisi *existing* permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan kategori kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan.
2. Mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terbentuknya kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau.
3. Merumuskan penerapan model perbaikan infrastruktur sebagai langkah penanganan masalah pada kawasan permukiman kumuh berdasarkan hasil analisis *existing* dan identifikasi masalah yang ditemukan dilapangan.

1.6. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan suatu masalah tertentu. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini diperlukan beberapa landasan teoritik sebagai dasar pijakan pelaksanaannya. Berikut beberapa landasan teori yang digunakan :

1.6.1. Teori Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai proses terus menerus yang melibatkan keputusan atau pilihan tentang cara-cara alternatif menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada suatu waktu dimasa

depan (Wijaya, D, 2016). Perencanaan pada umumnya dilakukan untuk membuat berbagai pilihan keputusan agar meminimalisir resiko saat keputusan telah diambil. Selain itu, perencanaan biasanya dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan karena didalamnya memuat berbagai macam sistematisa rencana dalam melaksanakan sesuatu. Teori perencanaan sangat dibutuhkan dalam melakukan perencanaan penataan dan pembangunan suatu kawasan atau wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Jika merujuk pada ulasan diatas, maka sangatlah dibutuhkan suatu pendekatan teoritis dalam melakukan perencanaan kawasan ataupun wilayah perkotaan. Perencanaan wilayah pada dasarnya merupakan ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan yang didalamnya terdapat unsur tata ruang dan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial secara terintegrasi (Sjafrizal, 2014).

Dalam penerapannya, teori perencanaan wilayah dibagi menjadi empat komponen antara lain : pertama yaitu perencanaan fisik (*physical planning*) untuk melakukan perencanaan pengembangan wilayah secara fisik. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik kota dengan jaringan infrastruktur kota menghubungkan beberapa titik simpul aktivitas. Dalam kajian teori ini aspek lingkungan menjadi salah satu perhatian penting serta dalam penerapannya, teori ini akan menghasilkan *output* dalam bentuk *masterplan*. Kedua, perencanaan ekonomi makro (*macro-economic planning*) untuk melakukan perencanaan ekonomi wilayah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan untuk membuat kebijakan ekonomi guna merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan aksesibilitas Lembaga keuangan, kesempatan kerja dan tabungan. Ketiga, perencanaan sosial (*social planning*) untuk membuat perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah. Perencanaan ini membahas tentang pendidikan, kesehatan, integritas sosial, kondisi permukiman, pengangguran, pemberdayaan perempuan dan anak serta masalah kriminal. Bentuk produk yang dihasilkan dari perencanaan ini adalah kebijakan demografis. Keempat, perencanaan pembangunan (*development planning*) untuk membuat perencanaan pembangunan secara komperhensif guna mencapai pengembangan wilayah (Archibugi dalam Zain DP, 2018).

Perencanaan bertujuan untuk memudahkan siapapun dalam proses pengambilan keputusan karena didalamnya terdapat berbagai opsi ataupun pilihan dengan beberapa pertimbangan resiko. Dalam skema pembangunan, pengembangan dan penataan kawasan permukiman, dibutuhkan sebuah konsep perencanaan yang baik sehingga perlakuan atau pilihan tindakan yang dilakukanpun menjadi tepat sasaran. Dalam penerapannya pada penelitian ini, teori perencanaan dibutuhkan guna merancang sebuah pemodelan kawasan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang ada pada objek penelitian.

1.6.2. Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh selalu identik dengan kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kehidupannya sehari-hari. Umumnya, permukiman kumuh merupakan lingkungan yang memiliki penurunan kualitas fungsi sebagai area hunian. Penurunan kualitas fungsi yang dimaksud antara lain seperti kepadatan bangunan sangat tinggi dengan

luas lahan yang terbatas, rawan penyakit sosial maupun penyakit lingkungan, kualitas bangunan sangat rendah, tidak tersediannya prasarana lingkungan yang memadai serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Ilmy, *et.al.*, 2017). Permukiman kumuh ditempati oleh sekelompok individu yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, jaminan sosial, daya tahan rumah dan kehidupan yang memadai (Uduak, 2009 dalam Simon, *et.al.*, 2013).

Tabel 1. 1. Kriteria, Indikator dan Penjelasan Teknis Kekumuhan

PARAMETER	SUB KRITERIA
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidaksesuaian Akses Aman Air Minum Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Ketidakterediaan Drainase Ketidakterhubungan Dengan Sistim Drainase Tidak Terpeliharanya Drainase Kualitas Konstruksi Drainase
Kondisi Pengolahan Air Limbah	Sistim Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis System Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sumber : Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana maupun prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Ayat 13). Amiany dalam M. Rizky dan Nira (2019) secara umum membagi pengertian lingkungan kumuh menjadi dua yaitu *slum* dan *squatter*. *Slum* merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni dan tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman dan daerah. Hunian *slum* ditandai dengan mutu bangunan yang rendah, tidak teratur serta tidak adanya atau buruknya sarana fasilitas umum. Sedangkan *squatter* merupakan ruang terbuka yang dijadikan tempat permukiman liar atau ilegal. Hunian *squatter* lebih mengacu kepada legalitas lahan yang ditempati

merupakan milik pihak lain. Baik dalam artian *slum* maupun *squatter*, permukiman kumuh selalu memberikan dampak pada perkembangan kota dan selalu menimbulkan masalah baru jika tidak sesegera mungkin diatasi. Bentuk penyelesaian persoalan kumuh diatasi sesuai dengan karakteristik dan tipologinya (Permen PUPR Nomo 14 Tahun 2018).

Tabel 1. 2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

TIPOLOGI	LOKASI
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatas air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatas air, baik daerah pasang surut, rawa sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditepi air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada ditepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya) namun berada diluar garis sempadan badan air dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada ditaran rendah	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10 %.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperbukitan	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40 %.
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada didaerah rawan bencana	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak didaerah rawan bencana alam , khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Sumber : Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018

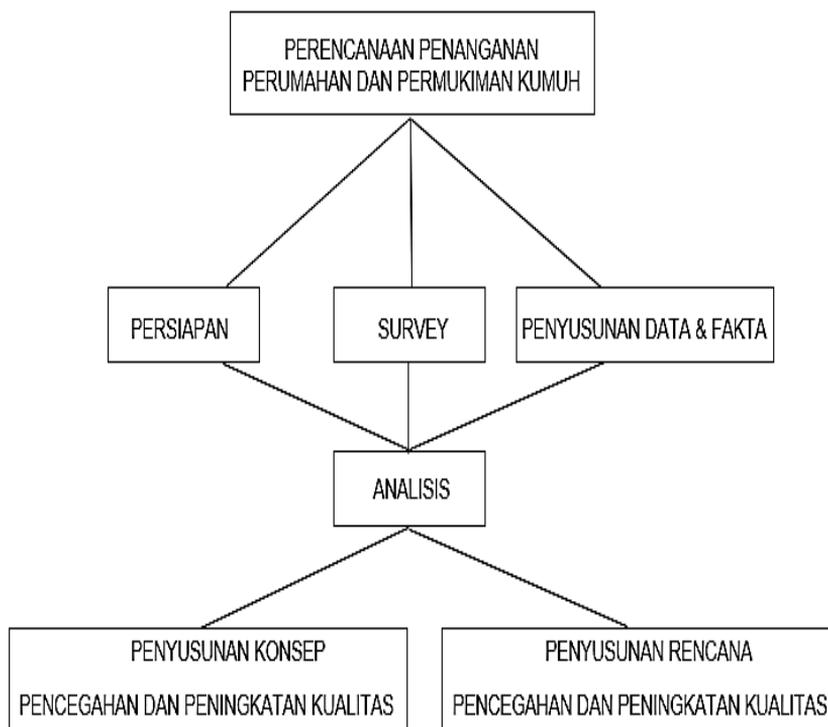
Tylor dalam Evans Oktaviansyah (2012) membagi tipe permukiman kumuh menjadi empat antara lain a) permukiman kumuh yang terdapat diatas air atau tepian pantai dan laut yang disebut sebagai “rumah terapung atau penghuni liar yang tinggal diatas perahu”; b) permukiman kumuh yang digolongkan sebagai kampung disebelah dalam kota; c) permukiman kumuh yang digolongkan sebagai kelompok hunian liar yang relatif terpusat ditengah kota (termasuk didalamnya permukiman kumuh disempadan sungai dan sempadan rel kereta api; dan d) permukiman kumuh yang digolongkan sebagai gubuk liar didaerah pinggiran kota. Mengetahui tipe permukiman kumuh merupakan salah satu strategi untuk dapat menentukan pola penanganannya sebab setiap karakter permukiman memiliki pola yang berbeda-beda untuk diintervensi sesuai dengan tingkat kekumuhan yang dialaminya. Penentuan dan penilaian kriteria dan tingkat kekumuhan suatu kawasan permukiman dapat dilihat sesuai dengan pembobotan skor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 sehingga melahirkan beberapa kategori kumuh yaitu kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan berdasarkan akumulasi skor sub kriteria yang ada pada Kawasan permukiman.

Tabel 1. 3. Pemberian Skor Sub Kriteria dan Parameter Penilaian

KUALITAS	PERSENTASE	SKOR
Baik	0 % - 25 %	0
Cukup Baik	26 % - 50 %	1
Buruk	51 % - 75 %	3
Sangat Buruk	76 % - 100 %	5

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2020

Penetapan lokasi Kawasan permukiman kumuh menggunakan beberapa kriteria antara lain: vitalitas ekonomi Kawasan, vitalitas non ekonomi, keadaan prasarana dan sarana, lehalitas lahan atau status kepemilikannya, komitmen pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, serta skala prioritas penanganannya (Ditjen Cipta Karya, 2006).

**Gambar 1.1.** Bagan Skema dan Tahap Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Sumber: Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018

Kawasan permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian masyarakat yang identik dengan ketidakteraturan bangunan serta rentan dengan berbagai persoalan sosial misalkan kebakaran dan kriminalitas. Selain menimbulkan berbagai gejala sosial, kawasan permukiman kumuh juga dapat menimbulkan citra buruk bagi suatu perkotaan sehingga berimbas pada aspek lainnya seperti aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak agar sesegera mungkin diatasi guna terciptanya sebuah kawasan permukiman yang

memiliki lingkungan sehat dalam segala aspek sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi cita-cita dunia saat ini.

1.6.3. Infrastruktur

Infrastruktur secara umum diartikan sebagai prasarana dasar baik berbentuk fisik maupun nonfisik yang dapat menunjang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 dijelaskan bahwa prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Jhingan (2004) mengartikan infrastruktur sebagai suatu barang yang komplementer yang sangat diperlukan bagi investasi swasta dan menjadi faktor penentu pertumbuhan jangka panjang.

Infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dalam Perpres tersebut, infrastruktur terbagi atas beberapa jenis salah satunya yaitu Infrastruktur ekonomi dan sosial yang mencakup : 1) Infrastruktur transportasi; 2) Infrastruktur jalan; 3) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) Infrastruktur air minum; 5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat; 7) Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) Infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) Infrastruktur ketenagalistrikan; 10) Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; 11) Infrastruktur konservasi energi; 12) Infrastruktur fasilitas perkotaan; 13) Infrastruktur fasilitas pendidikan; 14) Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; 15) Infrastruktur kawasan; 16) Infrastruktur pariwisata; 17) Infrastruktur kesehatan; 18) Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan 19) Infrastruktur perumahan rakyat.

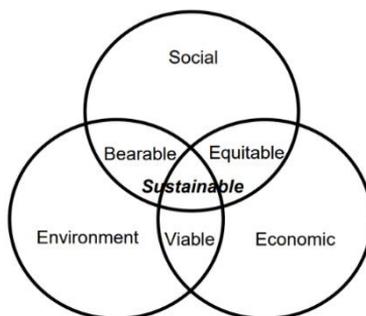
Infrastruktur merupakan prasarana dasar untuk mendukung ketersediaan sarana ataupun struktur lainnya sehingga dapat menopang segala aktivitas manusia dalam kehidupannya. Pada kawasan permukiman, ketersediaan infrastruktur berdampak dan mempengaruhi keberlangsungan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Begitupun sebaliknya, ketidak tersediaan infrastruktur pada kawasan permukiman akan mempengaruhi keadaan masyarakat yang bermukim pada kawasan tersebut sehingga memicu potensi terbentuknya suatu kluster permukiman kumuh baru. Namun pada masyarakat permukiman kumuh, perbaikan atau peningkatan kualitas infrastruktur merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kekumuhan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup baik secara sosial maupun ekonomi. Pada penelitian ini, kajian teori infrastruktur digunakan untuk melihat model infrastruktur berkelanjutan yang akan dijadikan sebagai solusi dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau.

1.6.4. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan didasari oleh hasil kesepakatan dunia dengan memasukkan lingkungan sebagai salah satu unsur penting didalamnya. Jika kita menengok jauh kebelakang, sejarah pembangunan berkelanjutan dimulai dari hasil konferensi mengenai lingkungan manusia (*Conference On The Human Environment*) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada

tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Kemudian PBB melalui *World Conference On Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 mempublikasikan sebuah laporan berjudul *Our common future* atau Brundtland report yang mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhinya. Setelah WCED, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan dilanjutkan pada United Nations' Earth Summit atau Konferensi Bumi PBB pada tahun 1992 di Rio Janerio yang menghasilkan agenda dua puluh satu serta disambung dengan pertemuan di Johannesburg oleh Majelis Umum PBB yang mengadopsi Mellenium Development Goals pada tahun 2000 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia pada tahun 2002 (Todoror dan Morinova, 2011 dalam Wibowo, 2014).

Lebih lanjut Todoror dan Morinova, 2011 dalam Wibowo membuat bagan pembangunan berkelanjutan menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resoerces* (IUCN) yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2. Bagan Pembangunan Berkelanjutan

Rahayu Effendi, *et.al.*, 2018, menjabarkan ruang lingkup lingkungan berkelanjutan sebagai berikut : yaitu pertama Lingkungan sosial dan ekonomi dimaksudkan untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh generasi masa depan demi menjaga keberlanjutan serta merancang produk yang berperan dalam keberlanjutan ekonomi. Kedua, Lingkungan hidup dimaksudkan untuk memelihara keanekaragaman hayati sumber daya alam, bertanggungjawab dalam penggunaan sumber daya alam berkelanjutan dengan penggunaan energi yang efisien, menjaga tingkat panen dengan tidak melebihi tingkat regenerasia, mengembangkan sumber daya tak terbarukan sebanding dengan berkurangnya sumber daya tersebut, penerapan daur ulang atau penggunaan ulang material serta mengurangi emisi limbah sebagai pertimbangan dampak terhadap lingkungan.

Berangkat dari berbagai definisi dan penjelasan mengenai pembangunan berkelanjutan sebagaimana ulasan diatas, maka konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya yang tersedia saat ini dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya untuk masa mendatang. Salah satu aspek penting dalam aktualisasi pembangunan berkelanjutan adalah skema pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mengintegrasikan 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu aspek lingkungan, aspek sosial maupun aspek ekonomi. Untuk dapat menciptakan sirkulasi sosial maupun ekonomi berkelanjutan, perbaikan kualitas lingkungan merupakan hal utama untuk diperhatikan sebab lingkungan

dapat menentukan *stagnan* maupun *progresifnya* suatu masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari serta mampu menopang kelangsungan dan keberkelanjutan ekonomi maupun sosial masyarakat dimasa mendatang.

1.7. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian model infrastruktur berkelanjutan pada penanganan kawasan kumuh di kecamatan Wolio Kota Baubau berangkat dari tidak teratasinya persoalan kumuh disekitaran pusat kota sehingga berdampak pada kualitas lingkungan yang tersedia. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis persoalan kekumuhan yang selama ini terjadi dengan menggunakan pendekatan prinsip atau konsep infrastruktur berkelanjutan sebagai basis sehingga penataan permukiman kumuh lebih mengarah kepada kebijakan penataan infrastruktur yang lebih baik. Keterbatasan literatur tentang model infrastruktur berkelanjutan pada penanganan kawasan permukiman kumuh menyebabkan peneliti mencoba untuk melihat beberapa kajian terdahulu terkait penanganan kumuh yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini pula didasari oleh beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan baik dari tema penelitian, jenis penelitian, teori penelitian maupun metode penelitian. Secara spesifik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini akan dilakukan kajian SWOT untuk membuat strategi penanganan dan pengambilan keputusan perencanaan infrastruktur sesuai dengan prinsip-prinsip *sustainable development goals (SDGs)* yang merupakan agenda dunia serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Maka untuk dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

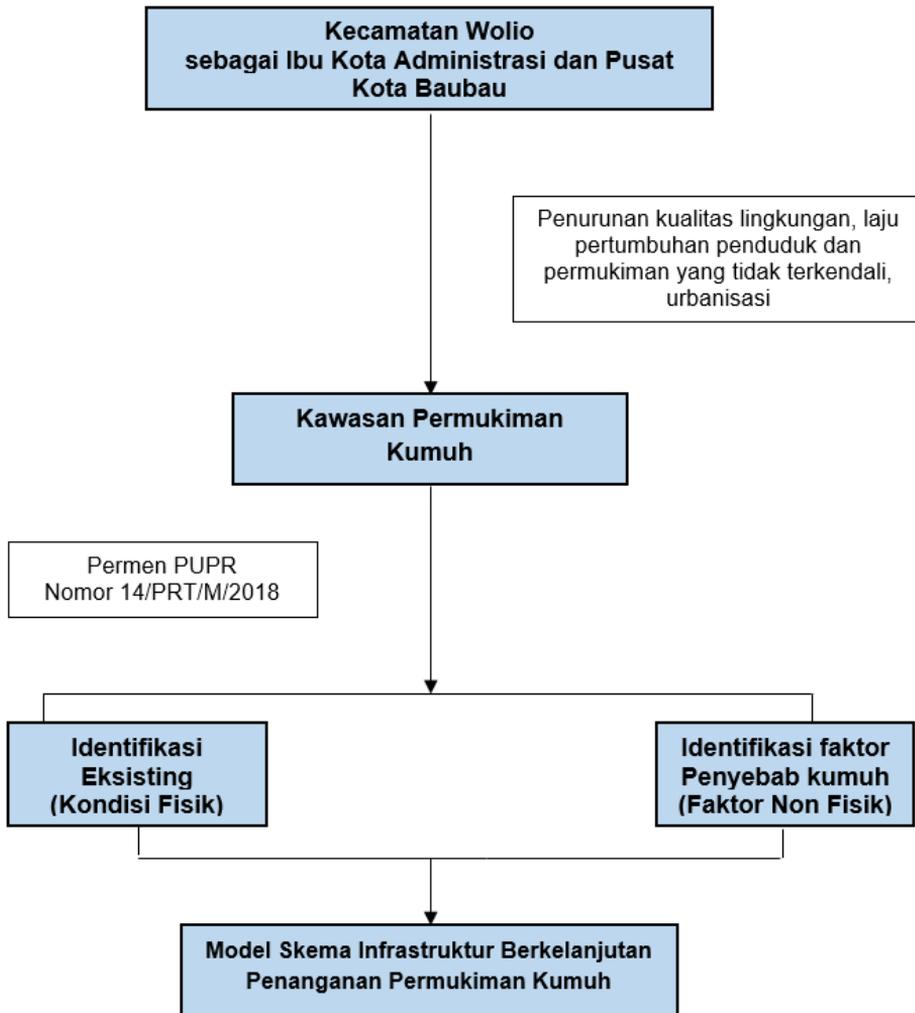
Tabel 1.4. Ringkasan penelitian terdahulu

Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Kajian Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Kesimpulan
Identifikasi spasial faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi	Retno Wijayanti, Atang Sutandi, Andrea Emma Pravitasari (2020)	Mengidentifikasi permukiman kumuh di Kota Bekasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi	Penelitian ini menghasilkan faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi adalah jumlah titik kumuh tiap kelurahan, presentase anak penduduk miskin tidak sekolah, indeks perkembangan kelurahan, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah dan persentase bangunan hunian yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan.	Mixed Metod	Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi tidak hanya faktor fisik, tetapi juga faktor non fisik sehingga mengakibatkan meningkatnya persentase KK permukiman kumuh di Kota Bekasi.
Model penanganan Kawasan permukiman kumuh berbasis sosio-spasial kasus: Kota Baubau	Dian Purnamasari Zain (2018)	Menganalisis karakteristik sosio-spasial Kawasan permukiman kumuh di Kota Baubau berdasarkan tipologi yang berbeda serta membangun model penanganan Kawasan permukiman kumuh perkotaan berdasarkan karakteristik sosio-spasial di tipologi Kawasan bantaran sungai, pesisir dan kampung tradisional.	Tipologi permukiman kumuh bantaran sungai merupakan prioritas I dalam penanganan Kawasan dengan indeks 0,624 dengan faktor sosio-spasial yang berperan yaitu indikator fisik-pola ruang dan indikator sisoal.	Analisis Spasial, deskriptif kuantitatif, <i>principal component analysis</i>	Dengan melibatkan identifikasi sosio-spasial terhadap penanganan Kawasan permukiman, akan mempermudah proses pengambilan keputusan pola apa yang akan digunakan.
Studi karakteristik dan pola penanganan Kawasan kumuh kota Baubau	Ishak Kadir (2010)	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan karakteristik Kawasan kumuh yang ada di Kota Baubau dan mencoba memberikan rekomendasi sebagai upaya penanganan terhadap permasalahan tersebut	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Wolio Kota Baubau merupakan kecamatan dengan tingkat kekumuhan tertinggi	Deskriptif kualitatif	Karakteristik Kawasan kumuh di Kota Baubau terdiri atas (1) Kawasan padat dan kumuh pusat kota, (2) Kawasan padat dan kumuh bantaran sungai, dan (3) Kawasan padat dan kumuh pesisir pantai
Model Infrastruktur Berkelanjutan pada penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau	La Ode Rizki Satria Adi Putra (2023)	Untuk mengetahui kondisi, faktor penyebab dan menemukan model skema infrastruktur berkelanjutan pada penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau	Membuat dokumen perencanaan model infrastruktur berkelanjutan dalam aspek lingkungan pada penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau	Analisis deskriptif, , SWOT	

1.8. Kerangka Konseptual dan Skema Teoritis

Pusat kota merupakan cerminan maju dan berkembangnya sebuah daerah perkotaan. Dalam teori konsentris yang dicetuskan oleh Burgess (1925), daerah pusat kota juga merupakan *central business district* (CBD) serta menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan menjadi zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Menjadi sangat penting bagi suatu daerah untuk menata kawasan pusat kota dengan baik sehingga benar-benar menjadi miniatur kemajuan sebuah daerah perkotaan.

Untuk dapat memperjelas maksud penelitian, maka diperlukan sebuah skema teoritis dan bagan penelitian guna tercapainya tujuan penelitian ini sebagaimana yang diinginkan. Berangkat dari ulasan sebelumnya, maka skema teoritis dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta dirumuskanlah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.3. Bagan Kerangka Konseptual

Tabel 1.5. Metode kriteria dan matriks kebutuhan data

Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Pengumpulan Data	Analisis Data
Apa sajakah faktor yang menyebabkan kekumuhan di Kecamatan Wolio Kota Baubau	Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Wolio Kota Baubau	Legalitas lahan Sosial ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Hunian tidak memiliki izin Kesesuaian lahan permukiman <ol style="list-style-type: none"> Kondisi etnik Persentase anak tidak sekolah Masyarakat prasejahtera Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 	Data Primer Data Sekunder	Analisis Deskriptif
Bagaimanakah kondisi permukiman kumuh di Kecamatan wolio Kota Baubau	Untuk mengetahui kondisi Kawasan kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau.	Kondisi bangunan gedung Kondisi jalan lingkungan Kondisi penyediaan air minum Kondisi drainase lingkungan Kondisi pengelolaan air limbah Kondisi Pengelolaan Persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan <ol style="list-style-type: none"> Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian Akses Aman Air Minum Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum <ol style="list-style-type: none"> Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Ketidakterediaan Drainase Ketidakterhubungan Dengan Sistim Drainase Tidak Terpeliharanya Drainase Kualitas Konstruksi Drainase <ol style="list-style-type: none"> Sistim Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis <ol style="list-style-type: none"> Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran 	Data Sekunder	Analisis Deskriptif
Bagaimana model skema infrastruktur berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau	Untuk mengetahui dan menemukan strategi penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Wolio Kota Baubau.	Hasil kajian dari 2 (dua) rumusan masalah sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh Faktor penyebab terjadinya kekumuhan 	Data primer dan Data sekunder	SWOT

1.9. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan penulisan dalam penelitian tesis ini direncanakan terdiri dari lima bab yang dimana setiap babnya diharapkan dapat menjelaskan secara utuh tentang masing-masing sub pokok bahasan agar lebih mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, landasan teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan skema teoritis dan sistematika penulisan.
2. Bab II Metode penelitian, terdiri dari penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, prosedur penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan definisi operasional.
3. Bab III Hasil penelitian, terdiri dari berbagai temuan dan olahan data yang diperoleh melalui metode penelitian yang dilakukan.
4. Bab IV Pembahasan, berisi tentang pembahasan terhadap hasil-hasil pengolahan segala data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
5. Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi yang akan diberikan oleh peneliti kepada berbagai *stakeholder* guna menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan untuk berbagai permasalahan perencanaan penataan Kawasan kumuh berbasis lingkungan berkelanjutan kedepannya.